Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Wildan Ulul Albab, Masna Nuros Safitri, Inarotul Insyaniah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

Email : wildanululalbab@mail.ugm.ac.id

Submitted: 19-02-2025; Reviewed: 26-07-2025; Revised: 30-07-2025; Accepted: 31-07-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25968>

Abstract

The main punishment mentioned in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code consists of imprisonment, closure, supervision, fine and community service. The renewal of the types of basic punishment, in this case social work punishment, certainly requires institutional readiness in its implementation and supervision. In this study, the researcher will examine the concept of the implementation of social work punishment in Criminal Law Reform in Indonesia and how the challenges of implementing agencies in the framework of implementing social work punishment as a form of punishment in national criminal law reform. The research method used in this research is Normative Empirical. The research concludes that the form of social work punishment in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code is by means of criminal offenders being required to carry out work or social activities that are beneficial to the community within a certain period of time. The challenges that will be faced by the government in relation to the implementation of social work punishment mainly lie in the unavailability of facilities and infrastructure and the lack of coordination between institutions implementing social work punishment. In addition, the difficulty also lies in the fact that the Government Regulation has not been ratified as an implementing regulation regarding social work punishment, so that the institutions implementing social work punishment cannot be sure of the concept and form of implementation of social work sanctions.

Keywords: Challenges, Implementing agencies, Social work

I. Pendahuluan

Mengawali penulisan ini penulis mengutip pendapat dari Hugo Grotius yaitu "*Malum passionis (quod inglitor) propter malum actionis*" yang artinya "penderitaan jahat disebabkan oleh perbuatan jahat".¹ Pada awal perkembangannya tujuan pemidanaan pada zaman dahulu bertumpu kepada teori pembalasan (*deterrence*), sebagaimana Immanuel Kant katakan bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan maka harus dibalas dengan ketidakadilan.² Namun pada kenyataannya paradigma pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek pembalasan tersebut telah mengalami pergeseran seiring disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Saat ini KUHP Baru tersebut berorientasi pada hukum pidana modern yang mengutamakan Keadilan Korektif, Keadilan Restoratif dan Keadilan Rehabilitatif, dalam hal ini pidana penjara adalah pidana pokok tetapi bukanlah hal yang utama.

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan objek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut sebagai hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dibahas dalam hukum penitensier menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit diartikan sebagai segala bentuk peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregel stelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana

¹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 27.

² Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang Pemyarakatan, hlm 11.

serta hak dan kekuasaan untuk, menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.³ Eddy O.S. Hiariej mengutip dari Thomas Aquinas menyatakan bahwa *“Poenae ut poenae, poenae ut medicine”* artinya pidana sebagai hukuman, tetapi juga pidana sebagai obat. Hal itu tentu harus dibarengi dengan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya melihat hukum pidana sebagai hukuman saja, tetapi hukum pidana harus memiliki dampak yang baik bagi pelaku tindak pidana nantinya ketika sudah menjalankan masa hukuman.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana telah dirumuskan dalam pembukaannya yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Lahirnya KUHP Baru tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. KUHP Baru nantinya akan menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië* (KUHP Lama). Oleh Sebab itu penyesuaian-penyesuaian terkait isi pasal dan penerapan pasal yang terkandung di dalam KUHP Baru perlu untuk segera ditindak lanjuti. Salah satunya mengenai Pidana Pokok yang semula dalam KUHP lama diatur dalam pasal 10 yang menyebutkan pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, dalam KUHP baru pasal 65 ayat (1) pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat jenis pidana baru yang diberlakukan dalam KUHP baru diantaranya yaitu pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis dapat menjadi salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.⁴ Pidana kerja sosial dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang dapat dijatuhkan hakim. Melalui jenis pidana ini disamping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan, terpidana juga dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif dalam membantu terpidana menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.⁵

Selain itu, permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Indonesia tentunya menjadi tantangan tersendiri, karena dapat menyulitkan dalam hal pembinaan, pengawasan, maupun pemeliharaan warga binaan. Oleh karenanya tentu memerlukan sebuah alternatif baru dalam sistem pembinaannya, selain itu pidana penjara yang dijalankan saat ini dirasa tidak efektif dalam melakukan pembinaan. Ketentuan pelaksanaan pidana kerja sosial hanya akan dapat dilakukan apabila didukung oleh sistem yang baik dan nilai yang ada di masyarakat.⁶

Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan tata kelola pemasyarakatan yang jelas dan komprehensif dengan memperhatikan aspek kelembagaan, kewenangan, dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang tercantum dalam KUHP Baru. Tetapi, pidana intinya kerja sosial di tiap-tiap negara hampir sama dalam pelaksanaannya, yaitu tidak diberi upah, tidak dapat diwakilkan, tidak dapat diganti denda, dan pekerjaannya mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selain itu penerapan pidana sosial hanya untuk tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya relatif pendek.⁷

Pembaharuan mengenai jenis pidana pokok ini utamanya pemberlakuan sanksi pidana kerja sosial tentu memerlukan kesiapan lembaga dalam pelaksana dan pengawasannya. Untuk itu penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana kesiapan lembaga pelaksana pidana kerja sosial yang kemudian akan dikhususkan di satu provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu pertama bagaimana konsep pelaksanaan pidana kerja sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan bagaimana kesiapan

³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2.

⁴ Shinta Rukmi, Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia, *Wacana Hukum* Vol. VII, No.1, April 2008, hlm.75

⁵ Naskah Akademik UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Ahmad Fajri, Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan, *Lex Renaissane*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hlm 51.

⁷ *Ibid*, hlm 53.

lembaga pelaksana pidana kerja sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga nantinya pembaca akan mengetahui konsep pelaksanaan pidana kerja sosial dalam kerangka Pembaharuan Hukum Pidana dan kesiapan lembaga pelaksana pidana kerja sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui gabungan antara metode normatif dengan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁹ Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui kajian kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sistematika hukum dan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini lembaga pelaksana pidana kerja sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Perkembangan dalam penerapan sanksi pidana selain penjara sebagaimana yang termuat dalam *The Tokyo Rules 1990 (United Nations Standard Minimum Rules For Non Custodial Measures)* mendorong negara-negara agar mengatur berbagai alternatif hukuman selain pidana penjara sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara.¹⁰ Hukuman non penjara adalah respon yang dirancang untuk mengurangi penggunaan penjara dalam beberapa tahapan di sistem peradilan pidana.¹¹ Pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana untuk respon atas beberapa masalah dalam sistem pemidanaan yang ada, seperti terus meningkatnya narapidana dan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga mengalami *overcrowding* serta tujuan dari rehabilitasi tidak tercapai maksimal.¹²

Akibat dari *overcrowding*, kondisi warga binaan lepas dan rutan menjadi mudah terprovokasi melakukan tindak pidana kekerasan dan kerusuhan sehingga seringkali susah dikendalikan petugas karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan.¹³ Selain itu, *overcrowding* dapat memicu adanya pelanggaran hak dan kebutuhan dasar narapidana yang kurang dipenuhi dengan baik oleh lembaga pemasyarakatan, juga meningkatkan anggaran negara karena membiayai penghuni rutan dan lepas yang terus meningkat. Alternatif sanksi pidana seperti kerja sosial diharapkan mampu menjadi solusi dari *overcrowding* rutan dan lepas.¹⁴ Pidana kerja sosial telah disahkan sebagai salah satu pidana alternatif yang menjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam KUHP Baru. Pengaturan ini merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia di mana pidana kerja sosial menjadi salah satu dari lima jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Menilik konsep dari pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dapat dipahami bahwa pemidanaan yang dibangun bertujuan untuk menyeimbangkan antara tindak kejahatan yang dilakukan dan kondisi pribadi

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 13.

⁹ Junaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm 149.

¹⁰ Rule 1.5 United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules).

¹¹ Faye S. Taxman dan Alex Breno, 2017, *Alternatives to Incarceration dalam Oxford Research Encyclopedias Criminology and Criminal Justice*, hlm. 1.

¹² Sani Siti Aisyah, Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 25.

¹³ Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13 No.3, 2019, hlm. 345-346.

¹⁴ Rully Novian, et.al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, ICJR, Jakarta, 2018, hlm. 34-35.

pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*), agar tercipta pilihan hukuman yang lebih humanis diluar dari hukuman penjara. Sanksi kerja sosial yang dijatuhkan dapat memberikan pelaku kesempatan untuk mengurangi rasa bersalah serta masyarakat juga dapat terlibat aktif pada proses rehabilitasi pelaku melalui kegiatan yang bermanfaat seperti sanksi yang memungkinkan pelaku untuk melakukan pekerjaan sosial sebagai bentuk tanggung jawab. Penjatuhan alternatif pidana merupakan wewenang hakim untuk memilih bentuk hukum pidana yang tepat untuk pelaku termasuk pidana kerja sosial, namun dalam memutuskan hakim harus berorientasi pada tujuan pemidanaan dengan kecenderungan memilih hukuman yang lebih ringan apabila hal tersebut dapat mencapai tujuan keadilan dan rehabilitasi untuk pelaku.¹⁵ Pidana kerja sosial yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana yang hukumannya ringan maka akan menanggulangi *overcrowding* pada Lapas dan Rutan.¹⁶

Bentuk pidana kerja sosial yang digambarkan dalam KUHP Baru yaitu pelaku tindak pidana diwajibkan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dalam kurun waktu tertentu serta tidak diberikan imbalan finansial. Pidana kerja sosial tidak mendapatkan upah karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*).¹⁷ Sebagai bagian dari pidana atau *punishment* maka pada dasarnya kerja sosial tidak dapat dikomersilkan.¹⁸ Manfaat ganda dari pidana kerja sosial dapat dilihat dari sisi yang dapat meringankan beban lembaga pemasyarakatan dan disisi lain dapat memberikan kesempatan pelaku tindak pidana memperbaiki dirinya tanpa harus kehilangan rasa percaya diri sekaligus memberikan kontribusi positif untuk masyarakat.¹⁹ Sehingga pidana kerja sosial tidak hanya dipandang sebagai hukuman fisik namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dalam upaya memperbaiki relasi antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana penjara atau denda untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dengan durasi antara 8 hingga 240 jam, dijalankan maksimal 8 jam per hari dan dapat diangsur hingga 6 bulan. Dalam menjatuhkan pidana ini, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk pengakuan dan persetujuan terdakwa, kemampuan kerja, riwayat sosial, serta agama dan keyakinan politiknya. Pengawasan dilakukan oleh jaksa, sementara pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jika terdakwa tidak menjalankan pidana kerja sosial, ia dapat diwajibkan mengulangi, menjalani pidana penjara, atau membayar denda yang telah diganti dengan pidana kerja sosial.²⁰

Perihal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dimana sanksi yang diberikan akan berfungsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tidak hanya dalam bentuk materiil tetapi juga dalam konteks sosialnya. Menurut Howard Zehr, salah satu tokoh terkemuka dalam *restorative justice*, fokus utama dari keadilan restoratif adalah pada pemulihan korban, pelaku, dan komunitas. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan pelaku berkontribusi secara langsung untuk memulihkan kondisi sosial yang terdampak oleh kejahatannya.²¹

Selain itu, teori *reintegrative shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite juga relevan dalam memahami sanksi kerja sosial. Braithwaite berpendapat bahwa hukuman seharusnya tidak hanya menghukum tetapi juga membuka ruang bagi pelaku untuk dipulihkan ke dalam masyarakat. Pidana kerja sosial memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan restitusi kepada masyarakat tanpa harus terisolasi di dalam penjara.²² Dengan demikian, sanksi ini dapat mencegah terjadinya stigma sosial yang

¹⁵ Penjelasan Pasal 65 ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁶ Jamilah, Asiyah, *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8, No 1, 2020, hlm. 26- 34.

¹⁷ Gatot Sugiharto, *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 3. Februari 2016, hlm. 90.

¹⁸ Iskandar Wibawa, *Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Media Hukum, 2017. Vol, 24 No.2. hlm. 113.

¹⁹ Rob Canton, *Probation and the Philosophy of Punishment*, *European Journal of Probation*, 65.3, 2018.

²⁰ Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Sandra Martinez Domingo and Eugènia Riera Casals, *The Culture Of Punishment: A Critical Approach Interview With Howard Zehr, Pioneer Of The Concept Of Restorative Justice*. 2023. <https://www.icip.cat/perlapau/en/article/interview-with-howard-zehr-pioneer-of-the-concept-of-restorative-justice/>.

²² Christian Wickert, "Reintegrative Shaming (Braithwaite)", 2019, <https://soztheo.de/theories-of-crime/sanctioning/reintegrative-shaming-braithwaite/?lang=en>.

sering kali melekat pada narapidana, dan sebaliknya, membantu mereka untuk reintegrasi dengan lebih baik.

Dibalik dari banyaknya potensi manfaat penerapan pidana kerja sosial yang diatur dalam KUHP Baru, dalam pelaksanaan nantinya perlu banyak persiapan serta membutuhkan aturan pelaksana yang komprehensif serta melibatkan kolaborasi lembaga dan pihak terkait untuk melaksanakan pidana kerja sosial dengan efektif.²³ Beberapa hal yang masih menjadi tantangan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial ini adalah kesiapan infrastruktur hukum dan teknis di lapangan. Sanksi ini membutuhkan regulasi yang jelas terkait bentuk pekerjaan yang bisa dilakukan, durasi hukuman, dan sistem pengawasan yang memastikan pelaksanaan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tanpa adanya aturan yang terperinci, pelaksanaan pidana kerja sosial berisiko mengalami ketidakadilan, terutama terkait dengan pemilihan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) KUHP Baru, peran hakim juga sangat sentral dalam proses ini, mengingat mereka bertugas untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengakuan terdakwa, riwayat sosial, dan kemampuan kerja sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial. Namun, masih ada pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk meneliti riwayat sosial terdakwa—apakah hakim sendiri atau PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan). Kejelasan aturan ini penting untuk menjamin kelancaran implementasi di lapangan. Hakim diwajibkan menentukan lama pidana kerja sosial dan jangka waktunya dalam putusan, namun tidak wajib menentukan bentuk spesifik aktivitas sosial. Ini memberi ruang bagi penuntut umum, dengan masukan dari PK Bapas, untuk menetapkan aktivitas dan lokasi yang sesuai. Meski begitu, demi kepastian hukum, sebaiknya hakim memiliki kewenangan untuk menentukan aktivitas kerja sosial yang harus dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu peraturan pelaksana KUHP Baru, khususnya terkait pasal yang memuat pidana kerja sosial harus dibuat secara komprehensif serta dapat melakukan komparasi dari negara lain yang telah menggunakan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidananya. Pelaksanaan sanksi kerja sosial telah diterapkan di beberapa negara seperti di negara Belanda dan Irlandia.

Belanda telah menerapkan pidana kerja sosial atau *community service order* (CSO) dalam Pasal 22c KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Sanksi ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan hingga sedang, sebagai alternatif dari pidana penjara atau denda. Penetapan Jenis Pekerjaan di Belanda, jenis pekerjaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.²⁴ Misalnya, pelaku yang melakukan tindak pidana ringan dapat diberikan tugas membersihkan fasilitas umum, memperbaiki taman kota, atau bekerja di lembaga sosial. Penetapan ini mempertimbangkan keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan dan kebutuhan masyarakat.²⁵ Dalam pidana pelayanan masyarakat, pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaannya dalam tiga bentuk, yaitu maksimal 240 jam, maksimal 480 jam untuk hukuman yang bersifat mendidik, serta perintah kombinasi dari keduanya.²⁶ Pelayanan masyarakat umumnya diberikan bersama dengan jenis hukuman lain, seperti pelayanan masyarakat yang digabungkan dengan hukuman penjara jangka pendek, hukuman percobaan, atau denda. Jika dikombinasikan dengan hukuman penjara, perintah pelayanan masyarakat hanya dapat diberikan bersamaan dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan.²⁷

Ketentuan mengenai pengawasan elektronik diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk KUHP Belanda, *Penitentiare Beginselenwet* (Undang-Undang tentang Prinsip Pemenuhan di Belanda), Undang-Undang 25 November 2015, Stb. 2015, 460 tentang Pengawasan Jangka Panjang, Pengaruh Perilaku, dan Pembatasan Kebebasan, serta dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu *Penitentiare Maatregel* (Peraturan tentang Pemenuhan di Belanda). Pengawasan yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak melanggar peraturan yang berlaku selama masa hukuman. Salah satu keunggulan sistem Belanda adalah fleksibilitas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

²³ Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama, Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Vol. 05, No. 02, 2023, hlm. 417-418.

²⁴ Miranda Boone, Only for Minor Offences: Community Services in the Netherlands, *European Journal of Probation University of Bucharest*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 36

²⁵ Federal Public Service Justice, 'Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU', Euprobation Project, 2021. https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=NL.

²⁶ Pasal 22c ayat (2) *Wetboek van Strafrecht*

²⁷ Pasal 9 ayat (4) *Wetboek van Strafrecht*

Pelaku diperbolehkan menjalankan sanksinya di luar jam kerja reguler, sehingga mereka tetap dapat mempertahankan pekerjaan atau pendidikan mereka.²⁸ Fleksibilitas ini dirancang agar pelaku tetap dapat menjalani kehidupan normal sembari menjalankan hukuman, sehingga mengurangi risiko marginalisasi sosial. Adanya sanksi tambahan jika tidak menyelesaikan apabila pelaku gagal menyelesaikan sanksi kerja sosial, pengadilan dapat mengganti hukuman tersebut dengan pidana penjara atau denda. Ini memastikan adanya tekanan bagi pelaku untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.²⁹

Sedangkan di Irlandia, pidana kerja sosial dikenal sebagai *community service* atau pelayanan masyarakat yang merupakan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu di masyarakat tanpa mendapatkan upah (renumerasi). Terdakwa yang mendapat hukuman ini adalah terdakwa yang oleh pengadilan akan dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) bulan atau kurang serta dijatuhkan untuk usia 16 tahun keatas dengan jangka waktu pelayanan sekitar 40-240 jam.³⁰ Pengadilan harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat. Pengadilan perlu mempertimbangkan kondisi pelaku serta meninjau laporan pemeriksaan dari petugas pembimbing kemasyarakatan (*probation officer*), dan jika diperlukan, mendengarkan pendapat dari petugas tersebut. Ketiga syarat ini harus menunjukkan bahwa pelaku layak dan memungkinkan untuk dikenai pidana pelayanan masyarakat. Selain itu, pelaku juga harus memberikan persetujuan atas hukuman pelayanan masyarakat yang akan dijatuhkan kepadanya³¹. Kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat berada di bawah layanan pembimbing kemasyarakatan (*probation service*) di setiap yurisdiksi pengadilan. Institusi ini bertanggung jawab memastikan terpidana memenuhi kewajiban yang ditetapkan, menilai kesesuaian tugas pelayanan masyarakat yang diberikan, serta melaporkan kepada pengadilan jika terpidana gagal menjalankan kewajibannya. Metode pengawasan di Irlandia, bagi pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi *Electronic Monitoring (EM)* yang bertujuan untuk mengurangi jumlah narapidana di penjara, menekan biaya penjara, dan menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana.³² EM diterapkan sebagai kebijakan awal (*front door policy*) saat hukuman dijatuhkan. Awalnya, pengawasan ini diterapkan pada narapidana yang pergi ke rumah sakit, lalu diperluas juga kepada mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat.³³

Jika terjadi pelanggaran, pengadilan berhak mengubah, memperbaiki, atau membatalkan perintah pelayanan masyarakat tersebut. Selama menjalani pidana pelayanan masyarakat, terpidana harus memenuhi beberapa kewajiban, antara lain: (i) melapor kepada petugas yang ditunjuk atau mewakili Direktur *Probation Service*; (ii) melaksanakan tugas yang diperintahkan sesuai waktu dan jenis pekerjaan yang ditetapkan di bawah pengawasan petugas; dan (iii) memberitahukan kepada petugas terkait jika terjadi perubahan alamat tempat tinggal.³⁴

Pidana kerja sosial di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), hanya saja berdasarkan penelusuran penulis dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Bapak Ove Syaifudin, salah satu peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* sebagai salah satu NGO yang aktif mengikuti perkembangan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia dari semula pidana penjara menjadi pidana alternatif diperoleh hasil bahwa meski pidana kerja sosial telah diatur dalam UU SPPA, namun pada faktanya hakim tidak pernah memutus pidana kerja sosial terhadap anak.³⁵

Pidana kerja sosial sulit untuk diterapkan diantaranya karena:

²⁸ Erasmus A.T. Napitupulu dkk., "*Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*", Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta: 2019, hal. 26.

²⁹ Jamin Ginting, Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Law Review*, Vol. 19. No.1, 2020, 254-258.

³⁰ Bagian 3 sub bagian 2 Criminal Justice Act 1983.

³¹ Bagian 4 Criminal Justice Act 2011.

³² Brian Moss, Electronic Monitoring and Monitoring Probation: The Case of Ireland, *European Journal of Probation*, Agustus 2018, hlm. 55.

³³ *Ibid*, hlm. 125.

³⁴ Bagian 7 Criminal Justice Act 1983 as amended by Section 6 Criminal Justice Act 2011.

³⁵ Wawancara bersama Ove Syaifudin pada tanggal 9 Oktober 2024.

- a) Pandangan aparat penegak hukum mengenai pemidanaan yang lebih menekankan bahwa tujuan dari pemidanaan untuk menimbulkan efek jera, sehingga pidana penjara merupakan pidana yang lebih sering dijatuhkan kepada para terpidana;
- b) Regulasi tidak berkembang dan peraturan pelaksana tidak tersedia, meskipun pidana kerja sosial telah diatur dalam UU SPPA namun pada faktanya aturan pelaksana mengenai hal tersebut tidaklah tersedia, sehingga sulit untuk aparat penegak hukum menerapkan pidana kerja sosial;
- c) Tidak tersedianya sarana dan prasarana guna penerapan pidana kerja sosial;
- d) Koordinasi antara lembaga penegak hukum belum terjalin; dan
- e) Kepercayaan masyarakat mengenai pidana kerja sosial masih tergolong minim, dengan diterapkannya pidana kerja sosial terhadap terpidana dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat seperti halnya hakim tidak adil, dan ada upaya “mempermainkan” hukum.³⁶

Kesulitan-kesulitan sebagaimana disebutkan diatas nampaknya juga menjadi kesulitan yang akan dihadapi dalam penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Baru. Hingga saat ini pembahasan mengenai aturan pelaksana pidana kerja sosial masih dalam proses pembahasan pemerintah, namun pembahasan pidana kerja sosial ini bukanlah menjadi pembahasan yang diutamakan, karena pemerintah akan mendahulukan aturan pelaksana mengenai perubahan tata cara hukuman mati dan hukum yg hidup dalam masyarakat terlebih dahulu dibanding aturan pelaksana pidana kerja sosial. Hal ini dikarenakan aturan pelaksana pidana kerja sosial akan tergabung dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sanksi tindakan sehingga pembahasan mengenai PP tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan pembahasan yang komprehensif.

Melihat dari negara-negara lain yang telah menerapkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan pidana kerja sosial yang penting untuk diadaptasi dan diintegrasikan dalam peraturan pelaksana KUHP Baru untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial dapat berjalan sebagai efektif, yaitu:

1. Penetapan jenis pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membersihkan fasilitas umum atau membantu lembaga sosial, dengan tugas yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Penetapan jenis pekerjaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana dan kebutuhan masyarakat, serta memperhitungkan kapasitas fisik dan psikologis pelaku.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan harus diatur secara komprehensif, ketat dan terstruktur agar tujuan dari kerja sosial dapat tercapai.
3. Memperhatikan peran dari petugas pembimbing kemasyarakatan (*probation officer*) dalam menilai kesiapan pelaku untuk menjalani pidana kerja sosial dan memantau pelaksanaannya. Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, pengadilan dapat meminta laporan dari petugas pembimbing kemasyarakatan mengenai kondisi pelaku, potensi rehabilitasi, dan kesiapan pelaku menjalani pidana kerja sosial. Pendekatan ini membantu menjamin bahwa sanksi yang diberikan tepat sasaran dan memperhitungkan faktor individu pelaku.

Selain itu, tantangan besar lainnya yang harus diperhitungkan adalah kesiapan lembaga pelaksana, baik lembaga pemasyarakatan serta dinas sosial yang akan menjadi kunci dalam implementasi pidana kerja sosial ini. Lembaga-lembaga tersebut memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam hal personil maupun anggaran, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi penting untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial. Mengingat KUHP Baru ini akan efektif diberlakukan pada 1 Januari 2026 sehingga patut untuk diketahui bagaimana bentuk peraturan pelaksana dan kesiapan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial ini.

B. Kesiapan Lembaga Pelaksana Pidana Kerja Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana jenis baru dalam penerapannya tentu memerlukan persiapan-persiapan, khususnya terkait kesiapan lembaga pelaksana dalam melaksanakan pidana kerja sosial. Penelitian ini berfokus pada kesiapan lembaga pelaksana pidana kerja sosial di Provinsi Daerah

³⁶ *Ibid*

Istimewa Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai pilot projek dari pelaksanaan penerapan pidana kerja sosial, sebelum diimplementasikan secara nasional nantinya. Meski begitu dalam pelaksanaannya di lapangan, lembaga-lembaga pelaksana tersebut (ketika penelitian ini dilakukan) masih menunggu peraturan turunan dari KUHP Baru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kemenkumham kanwil DIY) diperoleh hasil bahwa pembahasan mengenai peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana KUHP Baru saat ini baru membahas mengenai pengaturan pidana alternatif khusus kasus narkoba.³⁷

Apabila dilihat dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Tindakan, Pidana Kerja Sosial akan diatur dalam Paragraf 6 Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:³⁸

- (1). Pelaksanaan pidana kerja sosial dimuat dalam putusan pengadilan;
- (2). Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (3). Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) PP *a quo* menyatakan bahwa Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, fasilitas umum atau fasilitas sosial, atau lembaga sosial lainnya.³⁹

Berdasarkan hal tersebut tentunya sosialisasi terkait pelaksanaan KUHP Baru perlu dilakukan dan dimasifkan kembali. Mengingat apabila dilihat dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, pelaksanaan pidana kerja sosial akan melibatkan beberapa pihak atau lembaga-lembaga lain. Meskipun begitu, Kemenkumham khususnya Dirjen Pemasyarakatan sudah melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga yang berada di bawahnya termasuk Kemenkumham kanwil DIY terkait sosialisasi mengenai kesiapan dalam implementasi KUHP Baru. Bahkan sebenarnya hal tersebut menjadi aksi percepatan Kemenkumham sebagai target kinerja tahun 2024 yaitu mengurangi *Overcrowding* di Rumah Tahanan (Rutan) dan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁴⁰

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada 9 Februari 2022 lalu meluncurkan sebuah Rumah Singgah yang diberi nama Griya Abhipraya. Pada awal peluncurannya Griya Abhipraya bertujuan untuk mendukung penerapan *Restorative Justice* di Indonesia. Griya Abhipraya diharapkan menjadi rumah bagi para pelanggar hukum sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas agar mampu menjadi warga yang baik dan diterima kembali oleh masyarakat. Griya Abhipraya ini akan menjadi tempat penampungan sementara bagi Klien Pemasyarakatan yang belum dapat kembali ke tempat tinggalnya atau keluarganya, juga akan menjadi penyelenggara pendidikan berkelanjutan, baik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun klien Anak hingga klien dewasa.⁴¹

Griya Abhipraya memiliki beberapa macam fungsi diantaranya *pertama* Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menggandeng klien pemasyarakatan untuk melapor di Griya Abhipraya sebagai bentuk pengawasan, *kedua* Griya Abhipraya sebagai wadah pembimbingan lanjutan sesuai bakat dan minat yang akan dibina oleh kelompok peduli kemasyarakatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 24 Juli 2024.

³⁸ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Tindakan, Pidana Kerja Sosial

³⁹ Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 24 Juli 2024.

⁴¹ Kabar Pusat, 01 Maret 2022, *Rumah Singgah "Griya Abhipraya", Bantu Wujudkan Keadilan Restoratif di Indonesia*, <https://www.ditjenpas.go.id/rumah-singgah-griya-abhipraya-bantu-wujudkan-keadilan-restoratif-di-indonesia>, diakses pada 17 Sep 2024.

Kemenkumham kanwil DIY berpendapat bahwa keberadaan Griya Abhipraya ini diharapkan menjadi salah satu alternatif tempat pidana kerja sosial sehingga dapat menunjang dan mensukseskan penerapan KUHP Baru.

Selain aturan pelaksana yang masih belum tersedia, kekhawatiran yang hingga saat ini terjadi adalah kesiapan sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana pidana kerja sosial. Kesiapan aparat pelaksana ini memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pidana kerja sosial nantinya. Kemenkumham kanwil DIY mengakui bahwa mereka akan menjadi hilir dari pelaksanaan pidana alternatif tersebut. Sehingga pada saat ini Kemenkumham kanwil DIY masih terus menggodok sumberdaya manusia yang ada, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai salah satu pelaksana. Maka dari itu PK tersebut terus di bekali ilmu-ilmu tambahan seperti ilmu psikologi, kriminologi dll, guna menunjang pekerjaannya nantinya.⁴²

Mengacu pada pasal 85 ayat (8) KUHP Baru yang menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”. Kemudian lebih lanjut, dalam bagian penjelasan pada ayat (8) tersebut dikatakan bahwa “Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial”. Hal tersebut juga dipertegas dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dalam Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas dalam rangka persiapan untuk melaksanakan pidana kerja sosial, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY) menjadi salah satu lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam penerapan pidana kerja sosial. Namun setelah penulis melakukan wawancara terhadap Dinsos DIY penulis menemukan bahwa tidak ada koordinasi yang dilakukan antara Kemenkumham kanwil DIY dengan Dinsos DIY dalam rangka pembahasan mengenai pidana kerja sosial ini. Hal ini dimungkinkan terjadi karena belum adanya *legal standing* mengenai pidana kerja sosial tersebut, sehingga antar instansi yang berwenang belum dapat memutuskan peran dan wewenang masing-masing instansi dalam penerapan pidana kerja sosial ini. Dinsos DIY pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah diinstruksikan ataupun melakukan koordinasi dengan pihak manapun guna membahas mengenai peran dan tanggung jawab ataupun bentuk pidana baru yang tercantum dalam KUHP berupa pidana kerja sosial.⁴³

IV. Kesimpulan

Bentuk pidana kerja sosial dalam KUHP Baru yaitu pelaku tindak pidana diwajibkan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dalam kurun waktu tertentu antara 8 hingga 240 jam, dijalankan maksimal 8 jam per hari dan dapat diangsur hingga 6 bulan, namun tidak diberikan upah karena hal tersebut bersifat sebagai bentuk dari pidana (*work as a penalty*). Pidana kerja sosial tidak hanya dipandang sebagai hukuman fisik namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dalam upaya memperbaiki relasi antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana mengenai pidana kerja sosial belum juga disahkan, sehingga lembaga pelaksana pidana kerja sosial khususnya yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat memastikan bagaimana konsep dan bentuk pelaksanaan sanksi kerja sosial. Peraturan Pemerintah ini memang telah beberapa kali dilakukan pembahasan bersama di rumpun instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya saja belum ada koordinasi dan pembahasan antar lembaga yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dengan instansi lain yang juga memiliki tugas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial seperti halnya Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara keseluruhan, konsep pidana kerja sosial merupakan sesuatu yang baik. Namun hal tersebut memerlukan sumber daya yang baik, mulai dari petugas, personil dilapangan maupun anggaran, maka dari itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi penting untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial. Mengingat KUHP Baru ini akan

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 24 Juli 2024.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 03 September 2024.

efektif diberlakukan pada 1 Januari 2026 mendatang.

Daftar Pustaka

- Boone, Miranda. "Only for Minor Offences: Community Services in the Netherlands." *European Journal of Probation*, University of Bucharest, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Canton, Rob. "Probation and the Philosophy of Punishment." *European Journal of Probation*, 65.3 (2018). Criminal Justice Act 1983.
- Criminal Justice Act 2011.
- Domingo, Sandra Martinez dan Casals, Eugènia Riera. "The Culture of Punishment: A Critical Approach Interview With Howard Zehr, Pioneer of The Concept of Restorative Justice." 2023. <https://www.icip.cat/perlapau/en/article/interview-with-howard-zehr-pioneer-of-the-concept-of-restorative-justice/>.
- Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fajri, Ahmad. "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Renaissane*, No. 1, Vol. 4, Januari 2019.
- Federal Public Service Justice. "Probation Measures and Alternative Sanction in the EU." *Euprobation Project*, 2021. https://www.euprobationproject.eu/national_detail.php?c=NL.
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role of Correctional Adviser in Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2019.
- Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Law Review*, 19.1 (2020).
- Jamilah, Asiyah. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Kedilan*, 8, no. 1 (2020).
- Kabar Pusat. "Rumah Singgah 'Griya Abhipraya', Bantu Wujudkan Keadilan Restoratif di Indonesia." 01 Maret 2022. <https://www.ditjenpas.go.id/rumah-singgah-griya-abhipraya-bantu-wujudkan-keadilan-restoratif-di-indonesia>.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Napitupulu, Erasmus A.T. et al. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.
- Naskah Akademik UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Novian, Rully, Supriyadi W. Eddyono, Ajeng G. Kamilah, et al. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. Jakarta: ICJR, 2018.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rukmi, Shinta. "Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia." *Wacana Hukum*, Vol. VII, No. 1, April 2008.
- Siti Aisyah, Sani. "Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sugiharto, Gatot. "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 3, Februari 2016.
- Sutrisni, Ni Komang, dan I Nengah Susrama. "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Taxman, Faye S. dan Breno, Alex. "Alternatives to Incarceration." In *Oxford Research Encyclopedias: Criminology and Criminal Justice*, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Wetboek van Strafrecht*.
- Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017.
- Wickert, Christian. "Reintegrative Shaming (Braithwaite)." 2019. <https://soztheo.de/theories-of-crime/sanctioning/reintegrative-shaming-braithwaite/?lang=en>.